

PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA POHAN JULU KECAMATAN SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA

Luki Simanjuntak¹⁾, Delviana R.W Sihombing²⁾, Joan Berlin Damanaik³⁾

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
email: lukisimanjuntak376@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
email: delvianasihombing923@gmail.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
email: consuljoan3@gmail.com

Abstrak - Program Pemerintah Desa adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Program Pemerintah Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pohan Julu Kecamatan siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah data jumlah Kepala keluarga di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong yaitu sebanyak 533 Kepala Keluarga dengan menggunakan rumus slovin dan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 21.0. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa Korelasi Variabel Program Pemerintah Desa (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 0,958. pedoman interpretasi koefisien korelasi, maka koefisien yang ditemukan sebesar 0,958, termasuk kategori sangat Kuat. R square sebesar 0,918. atau sebesar 91,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Program Pemerintah Desa (X) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 91,8% dan sisanya 8,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Program Pemerintah Desa (X) berpengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara. Signifikansi korelasi variabel adalah sebesar 30,302. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan t_{table} dengan taraf kesalahan 5% $df = n-2 = 82$. Nilai t_{tabel} sebesar 1,664. Sesuai dengan syarat pengujian hipotesis bahwa $t_{hitung} (30,302) > t_{tabel} (1,664)$ dapat disimpulkan bahwa Program Pemerintah Desa (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara maka hipotesis penelitian diterima.

Kata Kunci : Program Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat

LPENDAHULUAN

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa



masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan berlangsung dari tataran tinggi sampai pada tataran rendah, salah satu tujuan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam tataran rendah bisa dilihat pada sistem pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan di desa mendasari bahwa desa memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui program-program yang dibuat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Namun demikian, Keterbatasan pemerintah menjalankan sistem pemerintahan maupun program kebijakan, juga menjadi tantangan yang dihadapi. Sulitnya pemerintah pusat untuk berhadapan langsung dengan masyarakat, merupakan hal utama yang menghambat pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karenanya, pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjadi prioritas program kegiatan pemerintahan desa terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Maka dalam hal ini program pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masalah kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap negara.



Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan memberikan fasilitas melalui berbagai bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Fasilitas tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial serta menggalakkan kewirausahaan. Desa dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri salah satunya yaitu dengan adanya program-program pemerintah desa.

Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan salah satu dari empat program prioritas pembangunan desa tersebut saat ini telah menjalankan program pemerintah desa selama 5 (lima) tahun terakhir diantaranya: (1) Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pembangunan jalan rabat beton dan gang agar transportasi hasil pertanian, home industry lancar dan menekan biaya angkut; (2) Perluasan Usaha Tani yaitu dengan memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan pertanian produktif dan Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian; (3) Terfasilitasinya Segala urusan Administrasi kependudukan masyarakat dari desa; (4) Skala prioritas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Pemerintah juga mengharapkan agar dana desa yang telah digelontorkan dana desa diharapkan bisa difokuskan kepada program-program prioritas tersebut yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan. Selain itu, pemerintah desa harus memiliki kesiapan dalam pengelolaan

anggaran dengan jumlah yang besar. Karena besaran Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahunnya selalu meningkat. Sesuai dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah disahkan pada tahun 2014 memberikan jaminan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa daripada yang sebelumnya.

Melalui uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemerintah Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Program Pemerintah Desa

Secara umum pengertian program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut setiawan (2015:17) “Program yaitu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan. Sedangkan program komputer yaitu urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu.

Pemerintah desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa (SEKDES) dan Pemerintah desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa (KADES). Adapun Pemerintah desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (KAUR)/ kepala seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/ kepala dusun (KADUS) yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam struktur organisasi tata kerja kepemerintahan (SOTK). Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa ada di dalam UU No. 32/ 2004 dan PP No. 72/ 2005. Jadi, yang dimaksud sebagai perangkat desa adalah sekdes, kaur/ kasi, dan kadus.



Menurut Saparin pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desabeserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:74) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yunika (2014) dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Berdasarkan Indonesian Human Development Report 2004 bahwasanya Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi (Keuangan, Industri), Perawatan Masyarakat (Kesehatan, Kesejahteraan Sosial), Pengembangan Manusia (Pendidikan) sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan).

Menurut Ambaddar (2008:39), menjelaskan bahwa Kesejahteraan Masyarakat adalah salah satu pendekatan yang harus menjadi prinsip utama bagi seluruh unit-unit pemerintahan maupun pihak korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan sosial.

Menurut Giarci dalam Subejo dan Supriyanto (2004:232) Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosial.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;



2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith dalam Hukom (2016:52) kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan;
2. Peningkatan tingkat kehidupan, pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan
3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan social dari individu dan bangsa

Hal ini berarti kesejahteraan dapat diukur dari pemerataan distribusi kebutuhan dasar, meningkatnya pendapatan, tingkat kehidupan dan pendidikan. Pada akhirnya hal-hal ini mencerminkan tujuan dari kesejahteraan yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Konsep kesejahteraan lainnya juga dikemukakan oleh Nasikun (1993) dimana kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indicator yaitu:

1. Rasa Aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan

III.METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah data jumlah Kepala Keluarga desa Pohan julu

kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 533 Kepala Keluarga.

Menurut Sugiyono (2015:75) "Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi". Untuk menentukan sampel pada penelitian ini maka digunakan rumus Slovin yaitu.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e² = batas toleransi error/ taraf kesalahan

Maka berikut perhitungannya :

$$n = \frac{533}{1 + 533 (10\%^2)}$$

$$n = 84,20$$

dibulatkan menjadi 84 kepala keluarga.

Berdasarkan rumus slovin tersebut ditetapkan sampel dalam penelitian ini adalah 89 Kepala Keluarga atau dapat dibulatkan menjadi 84 Kepala keluarga.

Teknik Pengumpulan Data adalah dengan: Kuesioner , wawancara dan observasi. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder.

Teknik analisis atau pengolahan data menggunakan metode :

- a. Analisis Korelasi Sederhana.
- b. Uji Determinasi
- c. Uji Regresi.
- d. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t)

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan analisa korelasi dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kuesioner dari tiap variabel. Adapun output dari korelasi secara parsial atau secara terpisah dengan menggunakan bantuan program SPSS

versi 21.0 dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel.4.29
Correlations

		Kesejahteraan_Masyarakat	Program_Pemerintah_Desa
Pearson Correlation	Kesejahteraan_Masyarakat	1.000	.958
	Program_Pemerintah_Desa	.958	1.000
Sig. (1-tailed)	Kesejahteraan_Masyarakat	.	.000
	Program_Pemerintah_Desa	.000	.
N	Kesejahteraan_Masyarakat	84	84
	Program_Pemerintah_Desa	84	84

Sumber: data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita bandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk pengambilan keputusan dimana r_{tabel} diperoleh sebesar 0,958. Kriteria pengambilan keputusan diambil dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, sebaliknya apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Berdasarkan data diatas maka r_{hitung} (0,958) > r_{tabel} (0,214) maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Program Pemerintah Desa (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) pada masyarakat kepala keluarga desa Pohan Julu.

Berdasarkan tabel 3.3 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi, maka koefisien yang ditemukan sebesar 0,958 termasuk kategori Sangat kuat. Jadi terdapat hubungan dengan tingkat Sangat kuat antara Program Pemerintah Desa (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

di desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong..

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable Program Pemerintah Desa (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) di desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong, digunakan uji koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 21.0 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	.918	.917	1.816

a. Predictors: (Constant), Program_Pemerintah_Desa

b. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Dari data diatas diperoleh nilai R Square sebesar 0.918 atau sebesar 91,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Program Pemerintah Desa (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) Di Desa Pohan Julu adalah sebesar 91,8% dan sisanya sebesar 8,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Kepemimpinan kepala Desa terhadap Kepuasan Masyarakat pada Desa Siborong-borong I kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, maka dapat dipakai perhitungan dengan menggunakan bantuan program spss versi 21,00. Hasil Uji Regresi linear Sederhana sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	5.911	1.819		3.250

Program_pemerintah_desa	1.585	.052	.958	30.302
(Constant)	5.911	1.819		3.250

- a. Dependent Variable:
Kesejahteraan_Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$= 5,911 + 1,585X$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa jika Program Pemerintah Desa atau $X = 0$ maka nilai Kesejahteraan masyarakat atau Y akan naik sebesar 5,911.

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t yaitu untuk mengetahui sejauh mana signifikansi pengaruh variabel. Untuk menghitung signifikansi pengaruh variabel digunakan formula dengan bantuan program SPSS versi 21.0 sebagai berikut : Berdasarkan tabel diatas diperoleh signifikansi korelasi variabel adalah sebesar 30,302. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan t_{table} dengan taraf kesalahan 5% $df = n-2 = 82$. Nilai t_{tabel} sebesar 1,664. Sesuai dengan syarat pengujian hipotesis bahwa $t_{hitung} (30,302) > t_{tabel} (1,664)$ dapat disimpulkan bahwa Program Pemerintah Desa (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Pohan Julu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, maka hipotesis penelitian diterima.

V.KESIMPULAN

- a. Diperoleh korelasi antara Program Pemerintah Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah positif sebesar 0,958. Hubungan positif tersebut menjelaskan bahwa setiap peningkatan variabel Program Pemerintah Desa (X) akan meningkatkan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y). Dengan melihat Tabel 3.2 Pedoman

Interpretasi Koefisien Korelasi, maka koefisien korelasi sebesar 0,958 termasuk kategori sangat kuat.

- b. Diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,918. Hal ini memberi arti bahwa variabel bebas yaitu Program Pemerintah Desa mampu menjelaskan variabel terikat yaitu Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,918 atau 91,8%. Selebihnya sebesar 8,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibicarakan dalam penelitian ini.
- c. Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: $Y = a + bX = 5,911 + 1,585X$
- d. Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa jika Program Pemerintah Desa atau $X = 0$ maka nilai Kesejahteraan masyarakat atau Y akan naik sebesar 5,911.
- e. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) diperoleh yaitu $t_{hitung} (30,302) > t_{tabel} (1,664)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara Program Pemerintah Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pohan Julu Kecamatan Siborongbrong Kabupaten Tapanuli Utara.

REFERENSI

- [1] ones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad
- [2] Panduan BUMDes . *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)* Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- [3] Subejo, Supriyanto. (2004) *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Bahan Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- [4] Sunarti, Euis.(2012) *Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di pedesaan dan perkotaan*. Institut Pertanian Bogor.Bogor



- [5] Sugiharto, Eko (2007) “*Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*”. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan EPP.Vol. 4. No.2.2007:32-36
- [6] Sugiyono, 2005.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta
Jurnal:
- [7] E Sugiharto (2007).*Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*. Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan 4 (2), 32-36.
- [8] Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- [10] Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa